



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

PUTUSAN **Nomor : 85-K/PM III-16/AD/VII/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ASBULLA
Pangkat/NRP	: Serda/31030274410282
Jabatan	: Babinsa Koramil 1417-02/Wawotobi
Kesatuan	: Kodim 1417/Kendari
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bau-bau, 14 Februari 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Perumahan Khalifa Residen Konda Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/3
Nomor: BP-19/A-12/V/2022 tanggal 4 Mei 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
143/HO selaku Papera Nomor: Kep/11/V/2022
tanggal 25 Mei 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/69/VI/2022
tanggal 10 Juni 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor:
TAP/85b-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 07
November 2022 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/85a-K/PM
III-16/AD/XI/2022 tanggal 08 November 2022
tentang Penunjukkan Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/85a-K/PM III-
16/AD/XI/2022 tanggal 07 November 2022 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan didaftarkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 26 Juli 2022.
- 2) Hari Kamis tanggal 22 September 2022.
- 3) Hari Kamis tanggal 17 November 2022.

- b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

- c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1417/Kendari Nomor: B/456/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Jawaban Panggilan Serda Asbulla NRP 31030274410282 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/69/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Hal 2 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

4 (empat) lembar foto copy Daftar Absensi Koramil 1417 02/Wawotobi dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 di antaranya atas nama Serda Asbullah NRP 31030274410282.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Dandim 1417/Kendari Nomor: B/611/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Jawaban Panggilan Serda Asbulla NRP 31030274410282.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/601/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/254/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/513/XI/2022 tanggal 04 November 2022.

Hal 3 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom XIV/3, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.17/A-12/IV/2022/ldik tanggal 20 April 2022 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/69/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 1417/Kendari Nomor: B/611/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadimya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal 4 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan

Hal 5 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Dandim 1417/Kendari Nomor: B/611/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Jawaban Panggilan Serda Asbulla NRP 31030274410282.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (secara in absentia). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda Asbulla NRP 31030274410282 dilakukan tanpa hadimya Terdakwa (secara in absentia) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/69/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sejak tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh bulan April tahun 2000 dua puluh dua di Kendari, setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat, NRP : Serda, 31030274410282, jabatan : Babinsa Koramil 1417-02/Wawotobi, kesatuan : Kodim 1417/Kendari.

Hal 6 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pagi di Koramil 1417-02/Wawotobi setelah dilakukan pengecekan personel Terdakwa tidak hadir selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita dilaksanakan serah terima piket yang saat itu seharusnya Saksi-3 (Serda Hasrin) beserta Terdakwa bertugas sebagai piket baru namun karena Terdakwa tidak masuk selanjutnya Saksi piket sendiri sebagai piket Koramil 1417-02/Wawotobi.

c. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita Saksi-3 menghubungi Terdakwa namun hp Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 (Serma Ahmadi (Bati Tuud Koramil 1417-02/Wawotobi)) kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada Danramil 1417-02/Wawotobi (Kapten Inf Samuri, S.E.) setelah mengetahui kejadian tersebut Danramil 1417-02/Wawotobi langsung melaporkan kepada Dandim 1417/Kendari (Kolonel Inf Widarto, S.Sos., M.M.).

d. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kodim 1417/Kendari yaitu memerintahkan anggota Koramil 1417-02/Wawotobi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang pernah atau biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sampai sekarang serta Dandim 1417/Kendari membuat surat kepada Danrem 143/HO nomor R/65/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang laporan THTI a.n. Serda Asbullah (Terdakwa) dilanjutkan dengan surat nomor R/102/II/2022 tanggal 11 April 2022 tentang laporan Desersi a.n. Serda Asbullah (Terdakwa) kemudian Dandim 1417/Kendari melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.17/A-12/IV/2022/ldik tanggal 20 April 2022 dari

Hal 7 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom XIV/3 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Ahmadin
Pangkat/NRP : Serma/21020209440880
Jabatan : Bati Tuud Koramil
1417-02/Wawotobi
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat dan Tanggal Lahir : Benua, 31 Agustus
1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds. Benua Kec.
Amonggedo Kab.
Konawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 di Koramil 1417 02/Wawotobi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan sekarang ketika Saksi dihubungi oleh Serda Hasrin (rekan naik jaga

Hal 8 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) selanjutnya melaporkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak tahu keberadaan Terdakwa kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun Hpnya tidak aktif setelah itu Saksi melaporkan kepada Danramil 1417-02/Wawotobi bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kodim 1417/Kendari yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang pernah atau biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sampai sekarang serta Dandim 1417/Kendari membuat surat kepada Danrem 143/HO nomor R/65/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang laporan THTI a.n. Serda Asbullah (Terdakwa) dilanjutkan dengan surat nomor R/102/II/2022 tanggal 11 April 2022 tentang laporan Desersi a.n. Serda Asbullah (Terdakwa) kemudian Dandim 1417/Kendari melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 sesuai surat nomor R/105/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang pelimpahan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi- 2:

Nama Lengkap : Heriyanto
Pangkat/NRP : Serda/31030294050583
Jabatan : Babinsa Koramil
1417-02/Wawotobi
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat dan Tanggal Lahir : Takalar, 10 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Chairil Anwar No.
42 Kel. Wua-wua Kec.
Wua-wua Kota
Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2012 di Yonif 725/rg dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wita ketika serah terima jaga dimana personel yang akan naik jaga adalah Terdakwa dan Serda Hasrin namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga piket saat itu a.n. Serka Gondong M. Afandi menghubungi hp Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Serma Surma (Bati Tuud Koramil 1417-02Nawotobi) dan menyampaikan untuk sementara Pratu Jery yang menggantikan piket Terdakwa kemudian melaporkannya kepada Danramil 1417-02/Wawotobi (Kapten Inf Samuri, S.E.) setelah mengetahui kejadian tersebut Danramil 1417-02/awotobi langsung melaporkan kepada Dandim 1417/Kendari (Kolonel Inf Widarto, S.Sos., M.M.).
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kodim 1417/Kendari yaitu memerintahkan anggota Koramil 1417-02/Wawotobi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang pernah atau biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sampai sekarang serta Dandim 1417/Kendari membuat surat kepada Danrem 143/HO nomor R/65/II/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang laporan THTI a.n. Serda Asbullah (Terdakwa) dilanjutkan dengan surat nomor R/102/II/2022 tanggal 11 April 2022 tentang laporan Desersi a.n. Serda Asbullah (Terdakwa) kemudian Dandim 1417/Kendari melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi- 3:

Hal 10 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Hasrin
Pangkat/NRP : Serda/31040313191182
Jabatan : Babinsa Koramil
1417-02/Wawotobi
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat dan Tanggal Lahir : Asinua, 28 November
1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kel. Bose-Bose Kec.
Wawotobi Kab.
Konawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 di Koramil 1417 02/Wawotobi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pagi di Koramil 1417-02/Wawotobi setelah dilakukan pengecekan personel Terdakwa tidak hadir selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita dilaksanakan serah terima piket yang saat itu seharusnya Saksi beserta Terdakwa bertugas sebagai piket baru namun karena Terdakwa tidak masuk selanjutnya Saksi piket sendiri sebagai piket Koramil 1417-02/Wawotobi.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa namun hp Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Serma Ahmadi (Bati Tuud Koramil 1417-02/Wawotobi) kemudian Serma Ahmadi melaporkannya kepada Danramil 1417 02/Wawotobi (Kapten Inf Samuri, S.E.) setelah mengetahui kejadian tersebut Danramil 1417 02/awotobi langsung melaporkan kepada Dandim 1417/Kendari (Kolonel Inf Widarto, S.Sos., M.M.).
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kodim 1417/Kendari yaitu memerintahkan anggota Koramil 1417-02/Wawotobi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang pernah atau biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sampai sekarang serta Dandim 1417/Kendari membuat surat kepada Danrem 143/HO nomor R/65/11V/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang laporan THTI a.n. Serda Asbullah (Terdakwa) dilanjutkan dengan surat nomor

Hal 11 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R/102/11/2022 tanggal 11 April 2022 tentang laporan Desersi an. Serda Asbullah (Terdakwa) kemudian Dandim 1417/Kendari melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadimya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

4 (empat) lembar foto copy Daftar Absensi Koramil 1417 02/Wawotobi dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 di antaranya atas nama Serda Asbullah NRP 31030274410282.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat, NRP : Serda, 31030274410282, jabatan : Babinsa Koramil 1417-02/Wawotobi, kesatuan : Kodim 1417/Kendari.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pagi di Koramil 1417-02/Wawotobi setelah dilakukan pengecekan personel Terdakwa tidak hadir selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita dilaksanakan serah terima piket yang saat itu seharusnya Saksi-3 (Serda Hasrin) beserta Terdakwa bertugas sebagai piket baru namun karena Terdakwa tidak masuk selanjutnya Saksi piket sendiri sebagai piket Koramil 1417 02/Wawotobi.
3. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita Saksi-3 menghubungi Terdakwa namun hp Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 (Serma Ahmadi (Bati Tuud Koramil 1417-02/Wawotobi)) kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada Danramil 1417 02/Wawotobi (Kapten Inf Samuri, S.E.) setelah mengetahui kejadian tersebut Danramil 1417-02/Wawotobi langsung melaporkan kepada Dandim 1417/Kendari (Kolonel Inf Widarto, S.Sos., M.M.).
4. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh pihak Kodim 1417/Kendari yaitu memerintahkan anggota Koramil 1417-02/Wawotobi melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang pernah atau biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sampai Dandim 1417/Kendari membuat surat kepada Danrem 143/HO nomor R/65/II/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang laporan THTI a.n. Serda Asbullah (Terdakwa) dilanjutkan dengan surat nomor R/102/II/2022 tanggal 11 April 2022 tentang laporan Desersi a.n. Serda Asbullah (Terdakwa) kemudian Dandim 1417/Kendari melimpahkan perkara tersebut ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal 13 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui berita surat maupun berita telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas operasi militer atau persiapan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1417/Kendari atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.17/A-12/IV/2022/ldik tanggal 20 April 2022 dari Denpom XIV/3 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 14 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Unsur Kesatu : "Militer".

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat, NRP : Serda, 31030274410282, jabatan : Babinsa Koramil 1417-02/Wawotobi, kesatuan : Kodim 1417/Kendari.
2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31030274410282 di

Hal 15 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 1417/Kendari dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat

Hal 16 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Maret 2022.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar pada 20 April 2022 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.17/A-12/IV/2022/ldik tanggal 20 April 2022 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang

Hal 17 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1417/Kendari sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1417/Kendari sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 atau selama 41 (empat puluh satu) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 41 (empat puluh satu) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Maret 2022

Hal 18 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 41 (empat puluh satu) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di

Hal 19 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Hal 20 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum

Hal 21 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

4 (empat) lembar foto copy Daftar Absensi Koramil 1417 02/Wawotobi dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 di antaranya atas nama Serda Asbullah NRP 31030274410282.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan sekarang. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ASBULLAH**, Serda NRP 31030274410282, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

4 (empat) lembar foto copy Daftar Absensi Koramil 1417 02/Wawotobi dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 di antaranya atas nama Serda Asbullah NRP 31030274410282.

Hal 22 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Christian Daniel Kilis, S.H. Letkol Laut (H) NRP 13026/P Panitera Pengganti, Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Johannes Sudarso Taruk, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Pelda Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal 23 dari 24 Put. No. 85-K/PM III-16/AD/VII/2022

